

## ABSTRAK

Penanganan tindak pidana ringan sebelum adanya PERMA Nomor 02 Tahun 2012 dilakukan menggunakan ketentuan Pasal 362 KUHP dan seringkali pelaku dijatuhi pidana lebih dari 3 bulan tanpa mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Selain itu, penggunaan Pasal 362 KUHP tersebut menimbulkan kritik maupun sorotan masyarakat dan menjadi beban pengadilan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum PERMA Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, perkara – perkara tindak pidana ringan tersebut telah membebani pengadilan. Masyarakat masih belum memahami proses penanganan perkara pidana hingga masuk ke ranah pengadilan, aparat pemerintah yang memiliki kewenangan menangani perkara, sehinggalah dalam tahapan penanganan perkara umumnya masyarakat hanya adanya suatu perkara pidana pada saat perkara tersebut sampai di pengadilan dan menuntut rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat.

Oleh karena itu maka penulis tertarik menulis tesis ini dengan judul "Analisis Yuridis Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP (Studi di Polres Pekalongan)".

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan yuridis empiris maksudnya pembahasan yang berdasarkan Undang-Undang dan peraturan lainnya yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan, observasi dan wawancara.

Di akhir penelitian penulis simpulkan bahwa Polres Pekalongan dalam menerapkan pasal untuk tindak pidana ringan telah disesuaikan dengan KUHP dan Perda yang berlaku di Kabupaten Pekalongan. Dalam proses pemeriksaan cepat yang dilakukan penyidik reskrim maupun sabhara, penyidik selalu memberikan arahan dan penjelasan kepada tersangka bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan. Penerapan peraturan mahkamah agung di tingkat penyidik khususnya penyidik sabhara masih cenderung monoton, yaitu pelanggarannya itu – itu saja. Contoh pelanggaran mengganggu ketertiban umum, minuman keras, mucikari, PSK, pemandu lagu dan penyedia karaoke. Sehingga pengetahuan penyidik terhadap peraturan mahkamah agung tersebut masih minim dan belum dapat menerapkan perma tersebut kepada masyarakat secara maksimal. Sebaiknya Kepolisian RI khususnya Polres Pekalongan melakukan penambahan personil, anggaran, maupun melakukan peningkatan kemampuan Penyidik dalam berbagai aspek khususnya tingkat pendidikan penyidik harus ditingkatkan secara individu maupun berkelompok. Perlu adanya standar atau kriteria yang jelas terkait pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada perorangan maupun kelompok. Hal ini Penyuluhan dan sosialisasi dilakukan dengan bertujuan memberitahukan kepada masyarakat bahwa ada berbagai peraturan hukum yang baru dan telah diberlakukan sehingga membuat masyarakat sadar akan hukum.

Kata kunci : Implementasi Perma, Tipiring, penyesuaian denda

## ABSTRACT

Handling light criminal acts before the Supreme Court Rules number 02 year 2012 is done using the provisions of article 362 of the Criminal Code and often the perpetrator of a criminal was sentenced to more than 3 months without considering the community's sense of fairness. In addition, the use of Article 362 of the Criminal Code that led to criticism nor the spotlight society and become a burden on the courts. It is as defined in Supreme Court Rules Public Explanation number 02 2012 about the Adjustments the mild criminal acts and Limits the amount of Penalty in the criminal code, the matter – things the light criminal acts has been burdening the courts. The community still do not understand the process of handling criminal cases up to get into the realm of the courts, government agencies have the authority to handle the matter, so that in the stages of the handling of the matter generally community only the presence of a criminal at the time the case got to court and demand a sense of Justice in society.

Therefore then the author interested in writing this thesis with the title "Analisis Yuridis Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP (Studi di Polres Pekalongan)".

In this study the author uses descriptive qualitative research type with empirical juridical meaning of the discussion based on the laws and other regulations which serve to see in terms of real law and examines how law works in the environmental community. Method of data collection with the study of librarianship, observation and interview.

At the end of the study authors conclude that police in Pekalongan resort applying article for mild criminal acts have been adapted to the criminal code and local regulations that apply in the Regency of Pekalongan. In the process of rapid examination conducted investigators or investigators, sabhara reskrim always provide referrals and explanation to suspect that acts committed constitute a criminal offence. The application of the rules of the Supreme Court in particular investigators investigator level sabhara still tend to be monotonous, i.e. his transgression that – that's it. Examples of violations of disturbing public order, liquor, pimps, prostitutes, and provider of karaoke song Guide. So the knowledge investigators against the rules of the Supreme Court is still minimal and have not been able to apply the perma to society to its full potential. Should the police force of the Republic of indonesia, especially police resort Pekalongan performs addition of personnel, budget, nor did the increased ability of Investigators in various aspects in particular levels of education investigators should be improved individually and in groups. Need for standards or criteria that clearly linked the granting of awards given to individuals or groups. This extension and dissemination is carried out with the aim to inform the public that there is a range of new legislation and have been enacted so as to make the public aware of the law.

Keywords: implementation of Perma, Tipiring, fine adjustment